



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Seminar Nasional:

***Keberlanjutan Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara dan
Kota Pusat Pemerintahan¹***

Keynote Speech oleh:

**Djoko Kirmanto
Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia**

**Yang saya hormati Ibu Armida S. Alisjahbana,
Kepala BAPPENAS,**

**Yang terhormat, Bapak Emil Salim, Ketua Dewan
Pertimbangan Presiden,**

**Yang terhormat, Bapak Gumilar R. Soemantri, Rektor
Universitas Indonesia,**

Yang terhormat, Ketua Komisi V DPR RI,

¹ *Keynote Speech* ini disampaikan pada acara Seminar Nasional “Keberlanjutan Jakarta sebagai Ibukota Negara” yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Lingkungan (PSIL) – Universitas Indonesia, pada tanggal 24 November 2010, di Kampus UI, Depok.

Yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan (PSIL),

Para pembicara, undangan dan peserta Seminar Nasional, serta para hadirin yang saya hormati,

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam Seminar Nasional « *Keberlanjutan Jakarta sebagai Ibukota Negara* » yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Lingkungan (PSIL) – Universitas Indonesia ini.

Saya menyambut baik inisiatif PSIL – UI, yang mengangkat tema aktual yang dewasa ini telah menarik perhatian besar banyak kalangan di Indonesia. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan dalam ikut menyampaikan beberapa gagasan dan pesan untuk dapat didiskusikan dalam Seminar yang sangat penting ini.

Hadirin yang Mulia,

Jakarta saat ini telah menjelma menjadi “*multi-function capital*” Indonesia, karena mengakumulasi berbagai fungsi terpenting secara nasional, seperti: pusat pemerintahan negara, pusat kegiatan perekonomian, bahkan pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta mewadahi berlangsungnya fungsi eksekutif (Istana Negara, kementerian/lembaga), fungsi legislatif (MPR, DPR dan DPD), dan fungsi yudikatif (Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) serta perwakilan kedutaan negara-negara sahabat.

Sementara itu, sebagai pusat kegiatan perekonomian, khususnya jasa dan perdagangan, Jakarta mampu memberikan kontribusi 16% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional (BPS, 2010). Dengan jumlah penduduk yang hanya 4% dari total nasional, Jakarta memiliki produktivitas sekitar 4 kali lebih besar dari rata-rata nasional.

Sebagai sebuah aglomerasi perkotaan, peran Jakarta dan kawasan sekitarnya bahkan semakin besar. Pada tahun 1993, kawasan ini menyumbang 25,1 persen dari total PDB Indonesia, lalu meningkat menjadi 25,5 persen pada tahun 2006².

Bila ditilik dari kuantitas dan kualitas sekolah dan universitas yang ada, Jakarta pun layak menyandang status sebagai pusat kegiatan pendidikan. Sedangkan ditinjau dari banyaknya gedung-gedung bersejarah peninggalan masa kolonial serta intensitas kegiatan seni dan budaya juga peran Jakarta sebagai pusat kegiatan budaya juga tidak dapat diabaikan.

Dengan fungsi yang beragam tersebut, Jakarta telah menjadi faktor penarik yang kuat bagi penduduk di daerah lain untuk bermigrasi. Dampaknya tidak sederhana, karena telah menimbulkan berbagai persoalan yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan secara tuntas.

² *World Bank (2010)*

Hadirin yang Saya Hormati,

Dalam tiga dekade terakhir, Jakarta sendiri telah mengalami degradasi kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh urbanisasi yang pesat. Dampaknya dapat kita kenali setidaknya-tidaknya dari 4 (empat) aspek, yakni : aspek lingkungan, aspek infrastruktur, aspek sosial, dan aspek tata kelola.

Pertama dari aspek lingkungan, banjir dan genangan adalah bencana yang rutin terjadi setiap tahun, bahkan diantaranya berskala besar. Sebut saja banjir yang terjadi tahun 1979, 1996, 2002, dan 2007 sebagai kombinasi dari curah hujan yang tinggi, propagasi air dari kawasan Puncak, serta keterbatasan sistem evakuasi air (kanal, drainase dan waduk) di Jakarta. Saat ini tidak kurang dari 14.237 Ha lahan perkotaan yang lokasinya tersebar di 78 titik, sangat rentan terhadap banjir dan genangan.

Berikutnya terkait kelangkaan sumber air bersih akibat penurunan kualitas yang signifikan. Waduk dan situ mulai tercemar berat sebesar 83%, sedangkan 17%

lainnya tercemar sedang. Kualitas air sungai kini tidak memenuhi baku mutu fisik, kimia, dan biologi (94% telah tercemar berat dan 6% tercemar sedang). Hal yang sama juga terjadi pada mutu air tanah, yaitu 12% tercemar berat, 20% tercemar sedang, 45% tercemar ringan, dan hanya 25% berada dalam kategori baik (BPLH Provinsi DKI Jakarta). Selain itu, pengambilan air tanah yang tidak terkendali telah memicu terjadinya intrusi air laut yang kini telah mencapai radius 15 km dari garis pantai.

Sementara itu, daya dukung lingkungan di Jakarta sudah berada pada taraf defisit. Telapak ekologis DKI Jakarta sudah mencapai sebesar 13,5 juta global hektar (gha), nilainya jauh lebih tinggi dari biokapasitasnya yang sebesar 142 ribu gha. Gaya hidup yang masih konsumtif, serta ketergantungan penduduk Jakarta terhadap provinsi lain yang sangat tinggi, seperti pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah merupakan penyebab tingginya telapak ekologis tadi. Tidak hanya itu, Jakarta pun

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap emisi karbon ke atmosfer.

Kedua, dari aspek infrastruktur Jakarta dan sekitarnya telah mengalami krisis yang cukup serius. Kapasitas pengolahan dan distribusi air bersih masih tidak memadai, yaitu hanya 50% masyarakat terlayani, terlebih dengan adanya tingkat kebocoran yang relatif tinggi (sebesar 47%).

Di bidang persampahan, 2% sampah (540 m^3) per hari tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Belum lagi bila kita melihat kapasitas TPA yang semakin hari semakin terbatas, sementara lahan baru semakin sulit diperoleh.

Dari sisi infrastruktur hijau, terdapat penurunan luas ruang terbuka hijau (RTH) yang besar dari 51,2 % di tahun 1972 menjadi hanya sekitar 10% saja di tahun 2010. Untuk mencapai target minimal RTH sebesar 30% sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, upaya yang harus dilakukan Pemerintah DKI Jakarta sangatlah tidak mudah.

Selanjutnya, ketiga, dari aspek sosial, walaupun laju pertumbuhan penduduk di pusat kota relatif stabil dalam satu dekade terakhir, terdapat laju yang pesat di kawasan pinggiran/perbatasan Jakarta.

Dari sisi sosial, kita pun tidak dapat mengecilkan pertumbuhan sektor informal yang menghiasi koridor-koridor utama jalan raya di Ibukota, serta di sekitar pusat-pusat perdagangan. Sektor informal merupakan salah satu indikator terdapatnya tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di Jakarta.

Dari aspek tata kelola, kerjasama antar daerah dalam kerangka kawasan metropolitan hingga kini juga masih belum efektif. Masing-masing daerah masih belum mampu bersinergi, masih diperlukan koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pemrograman hingga implementasi program pembangunan. Kepemimpinan kolektif pada tingkat metropolitan kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga Jakarta dan sekitarnya belum mampu berkembang secara matang berdasarkan satu visi jangka panjang.

Hadirin yang Berbahagia,

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa persoalan daya dukung lingkungan sangat dominan terjadi di Jakarta. Masa depan DKI Jakarta yang juga berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan juga menjadi pertarungan bangsa. Ruang-ruang manuver untuk solusi kebijakan perlu dikenali secara lebih dalam.

Secara garis besar, adanya 3 (tiga) skenario dalam menyikapi permasalahan Jakarta kedepannya, kiranya dapat dipertimbangkan dan menjadi referensi untuk diskusi dalam Seminar ini.

Skenario **pertama** adalah revitalisasi. Artinya, Ibukota tetap di Jakarta namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memperbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, banjir, kekumuhan, degradasi lingkungan, dan kemiskinan, dengan berdasarkan kepada rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta dan RTRW Kab/Kota sekitarnya, dalam satu kesatuan *eco-region* yang telah termuat dalam RTR Jabodetabekjur.

Skenario **kedua**, yakni pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Berdasarkan skenario ini, Jakarta akan tetap berfungsi sebagai Ibukota Negara dengan mengutamakan faktor historisnya, namun Pusat Pemerintahan (*seat of government*) akan dipindahkan ke lokasi baru. Untuk itu, perlu dipertimbangkan faktor jarak antara Jakarta dengan pusat pemerintahan baru, khususnya terkait dengan infrastruktur wilayah (antara lain transportasi darat dan udara, energi dan air baku). Contoh skenario kedua ini telah ditempuh oleh beberapa negara, seperti misalnya Malaysia dengan pemisahan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Sedangkan skenario **ketiga** adalah membangun Ibukota Negara termasuk pusat pemerintahan yang baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis. Skenario ini memerlukan strategi perencanaan yang lebih menyeluruh, serta perkiraan biaya yang lebih besar. Solusi membangun Ibukota Negara sekaligus sebagai pusat pemerintahan secara bersamaan telah berhasil dilakukan, misalnya oleh Australia dengan membangun Kota Canberra, Amerika

Serikat dengan Kota Washington, dan Belanda dengan Kota Den Haag.

Dari ketiga skenario tersebut perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh, seksama, dan terencana, karena dampaknya akan sangat besar bagi Indonesia.

Terlepas dari pilihan skenario yang akan nantinya ditetapkan, Kota Jakarta sendiri dengan berbagai persoalannya sudah sangat mendesak memerlukan solusi untuk keberlanjutan fungsi kota yang lebih efektif mampu menyejahterakan warganya. Pendekatan solusi “business as usual” (BAU), yang umumnya memerlukan waktu yang sangat panjang, sudah seyogyanya perlu diganti dengan pendekatan yang lebih progresif, dan hal ini tepat kiranya bila kemudian dapat diakomodasi dengan baik ke dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta, yang sekarang sedang dalam proses finalisasi.

Hadirin yang Saya Hormati,

Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa tidak ada solusi yang mudah bagi Jakarta dan bangsa Indonesia. Namun kita tentunya bisa banyak belajar dari kisah-kisah baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh banyak negara. Sudah seyogyanya, kedepan, berjalannya fungsi-fungsi ibukota negara dan/atau pusat pemerintahan kiranya akan dapat lebih terjamin berada pada kualitas ruang kota yang berkelanjutan, dan mampu melambungkan tingkat peradaban bangsa yang unggul.

Saya sangat berharap agar Seminar Nasional ini dapat memberikan pencerahan dan solusi yang konkrit dalam merespon tantangan terhadap Kota Jakarta, keberadaan sebuah Ibu Kota Negara, dan/atau sekaligus Kota Pusat Pemerintahan.

Seminar ini memiliki makna yang sangat strategis, karena memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mendiskusikan berbagai alternatif solusi kebijakan secara mendalam.

Waktu yang kita miliki tampaknya tidak banyak. Untuk itu rekomendasi yang keluar dari Seminar ini diharapkan akan dapat menjadi masukan yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan mengenai masa depan Jakarta, Ibukota Negara, dan Pusat Pemerintahan yang lebih fungsional, efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Pekerjaan Umum,

DJOKO KIRMANTO